

Presiden Jokowi Tinjau Kegiatan Vaksinasi Pelajar di Samarinda

SAMARINDA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pelajar di SMP Negeri 22 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Penyuntikkan dosis pertama vaksin Sinovac bagi pelajar di Kota Samarinda diikuti sebanyak 1.053 peserta.

“Kita harapkan semuanya berjalan lancar dan segera terbangun kekebalan komunal di seluruh Provinsi Kalimantan Timur dan kita berharap penyebaran Covid-19 dapat segera dikurangi dan dihilangkan dari provinsi ini,” ujar Jokowi saat melakukan peninjauan, Selasa (24/8).

Turut mendampingi Presiden, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Selain di Kota Samarinda, sembilan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur juga secara bersamaan melakukan kegiatan vaksinasi bagi masyarakat umum. Wilayah tersebut antara lain Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabu-

paten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Mahakam Hulu.

Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Samarinda Mangsi Raja Simarmata turun langsung memastikan aplikasi P-Care Vaksinasi berjalan dengan lancar pada kegiatan vaksinasi bagi pelajar yang dilaksanakan langsung oleh Presiden.

Menurut Mangsi, peran dan dukungan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 adalah menyiapkan sistem informasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening, pencatatan hasil observasi pasca vaksinasi, hingga pencatatan dosis vaksinasi melalui aplikasi P-Care Vaksinasi.

“Kami harapkan penggunaan aplikasi P-Care Vaksinasi dapat mempercepat proses vaksinasi. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda yang telah menyediakan jaringan internet yang sangat memadai,” ujar Mangsi. ● **mei**

Polhukam



Ketua Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pemilu Diperlukan

Banyak ditemukan pelanggaran pemilu yang disebabkan pada penafsiran keliru perihal regulasi UU Pemilu. Sebab itu, UU Pemilu perlu direvisi.

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, bahwa revisi Undang-Undang Pemilu diperlukan untuk lebih menyempurnakan proses dan tahapan pemilu serta meminimalisir pelanggaran pemilu yang kerap terjadi.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Doli dalam peluncuran buku Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan Bawaslu RI, Kamis (26/8).

Ia mengatakan bahwa di masa pandemi banyak pelanggaran pemilu. Baik secara etis, administratif, dan pidana. Item pelanggaran yang semakin bertambah karena ada item penerapan protokol kesehatan.

Ahmad Doli mengaitkan proses dan tahapan pemilu serta meminimalisir pelanggaran pemilu yang kerap terjadi.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Doli dalam peluncuran buku Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak 2020 yang dilaksanakan Bawaslu RI, Kamis (26/8).

Ia mengatakan bahwa di masa pandemi banyak pelanggaran pemilu. Baik secara etis, administratif, dan pidana. Item pelanggaran yang semakin bertambah karena ada item penerapan protokol kesehatan.

2020 karena penerapan Prokes, dapat menyebabkan kluster baru. Bahwa sesungguhnya masih banyak pekerjaan rumah dalam regulasi,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Ia menyebutkan telah menemukan beberapa peristiwa pelanggaran pemilu yang disebabkan pada penafsiran keliru perihal regulasi UU Pemilu. Dirinya juga menyoroti agar kewenangan antara instansi penyelenggara pemilu tidak saling tumpang tindih.

“Jangan ada overlapping yang dapat menyebabkan masalah baru di lapangan. Penyelesaian sengketa terhadap pemilu tidak bisa kita pastikan, penyelesaian seperti apa. Kami menyoalkan pola koordinasi sistem koordinasi antara penegakan hukum, pengawasan, dan penyelenggaraan kepastian

tidak ada pelanggaran terhadap pemilu harus dipastikan,” jelas Ahmad Doli Kurnia.

Ia menyoroti sejumlah persoalan sengketa Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 silam masih ada sejumlah sengketa yang belum selesai sampai saat ini. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada standar tidak jelas dalam penyelesaian sengketa pada Pilkada serentak 2020.

“Kita tidak punya batasan kapan sengketa ini berakhir. Ini berbeda dengan Pilkada 2015-2018 ada PSU, ada gugatan, dan kemudian dilanjutkan seterusnya. Buku ini menjadi entry poin untuk membangun kesadaran bahwa dalam penyelenggaraan pemilu ada PR mawaspada pelanggaran, dan pelaksanaan lebih baik,” kata Ahmad Doli Kurnia.

Perihal rencana Revisi UU Pemilu, pihaknya masih belum melaksanakan. Tapi bukan berarti Revisi tersebut tidak penting. “Niat kita merevisi UU Pemilu kita delay dulu, simpan dulu. Agar pemilu kita semakin

baik, perubahan regulasi menjadi penting. Catatan terakhir adalah dengan kehadiran buku ini kita sama-sama bisa memahami pentingnya satu institusi yang dapat menangani masalah ini,” jelas Ahmad Doli Kurnia.

Pihaknya di Komisi II DPR RI melakukan kajian mendalam agar ada penguatan sisi hukum dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan stakeholder terkait.

“Kita berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Kemendagri terkait kehadiran institusi yang bisa menjawab permasalahan. Harus ada pendidikan politik, pemahaman bagaimana kita terlibat Pemilu yang bersih, berintegritas berkeadilan pelanggaran administrasi dan pidana. Semakin terbangun kesadaran masyarakat untuk tidak melaksanakan politik uang, transaksi politik,” lanjut Ahmad Doli Kurnia. ● **mei**

Puan Maharani Ajak Masyarakat Terbiasa Hidup dengan Prokes Ketat dan Disiplin

JAKARTA (IM) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat Indonesia untuk terbiasa hidup dengan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 ketat dan disiplin. Sebab, sejumlah ahli kesehatan atau epidemiolog mengatakan kekebalan komunal (herd immunity) dari virus Covid-19 sulit tercapai akibat mutasi virus Corona.

“Saya berharap masyarakat akan terus terbiasa hidup bersama protokol kesehatan dalam menghadapi virus Covid-19 yang diprediksi akan ada di tengah-tengah kita untuk waktu lama,” ujar Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Kamis (26/8).

Sejumlah guru besar epidemiologi menyebut herd immunity tak akan terjadi, sekalipun vaksinasi terus dikejar sesuai target. Hal tersebut lantaran terus terjadinya mutasi-mutasi virus Corona yang menyebab-

kan tingkat kemanjuran vaksin (efikasi) tidak optimal.

Munculnya varian delta bahkan disebut menurunkan efikasi vaksin Pfizer dan Moderna yang nilainya cukup besar, yakni dari angka 90-an persen menjadi sekitar 60-70 persen. Padahal, kata Puan, terjadinya herd immunity dipengaruhi oleh efikasi vaksin dan jumlah penduduk yang telah divaksin secara lengkap.

“Apalagi mutasi-mutasi virus Covid terus terjadi, termasuk yang baru saja teridentifikasi munculnya varian baru Corona, yakni varian lambda,” kata Puan Maharani.

Meski begitu, Puan menyebutkan bukan berarti vaksinasi Covid tidak efektif untuk dilakukan. Hanya saja, ia meminta masyarakat mempersiapkan diri apabila Covid-19 berubah statusnya dari pandemi menjadi endemi.

“Vaksin memang tidak akan membuat tubuh kebal dari virus. Tapi dengan mendapatkan vaksin, tingkat risiko menjadi lebih kecil saat kita terpapar Covid-19. Sama dengan jenis penyakit-penyakit virus lain yang hingga saat ini tidak bisa hilang,” jelas Puan Maharani.

Vaksin sebagai bentuk perlindungan komunal (herd protection), mulai dari keluarga sampai komunitas, termasuk di dalamnya orang-orang yang memiliki komorbid dan tidak bisa mendapat vaksin.

“Virus Covid-19 sangat berbahaya bagi mereka yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta. Dengan mendapat vaksin, harapannya tubuh memiliki antibodi untuk melawan virus ini sehingga semakin sedikit orang yang terpapar Covid, yang artinya semakin sedikit pula kemungkinan penularan terjadi kepada mereka yang berada dalam kategori rentan,” jelas Puan Maharani. ● **ber**

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT TRI SUKSES PERKASA

Direksi PT TRI SUKSES PERKASA (“Perseoran”) dengan ini menyampaikan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseoran untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, : Senin
tanggal : 13 September 2021
Waktu : 18.00 WIB
Tempat : Kantor Perseoran

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas pembubaran Perseoran; dan
2. Penunjukan Likuidator

Jakarta, 27 Agustus 2021
PT Tri Sukses Perkasa
Direksi

DIJUAL TANAH DAN BANGUNAN

TANAH DAN BANGUNAN LUAS TANAH 810 m2 DAN LUAS BANGUNAN 563 m2 TERLETAK DI JL. GEDUNG HIJAU RAYA NO. 15 KELURAHAN PONDOK PINANG JAKARTA SELATAN HUBUNGI : SUFENDI HP 0896 6049 5611

MPR Dorong Segera Dibuat RUU Perlindungan Agama

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Hidayat Nur Wahid menyebutkan, MPR tengah mendorong agar RUU Perlindungan Agama segera dibuat untuk mencegah berulang-ulang kasus penistaan agama yang diakui di Indonesia.

“DPR dan Pemerintah untuk segera membahas RUU Perlindungan terhadap semua Agama yang diakui di Indonesia,” ujar Hidayat Nur Wahid, Kamis (26/8) dalam keterangan tertulisnya.

Ia menyebutkan RUU tersebut juga diperlukan untuk melindungi simbol agama. Serta sebagai alat hukum untuk membentengi semua Agama yang diakui di Indonesia beserta simbolnya dari pelecehan dan penghinaan dan tindakan

ing akun media sosialnya beberapa waktu terakhir.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kemudian menangkap Youtuber Muhammad Kece pada Rabu (25/8) lalu di Bali dan akan dibawa ke Bareskrim Mabes Polri di Jakarta. ● **mei**

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham dalam PT LAWANA SUKSES NUSANTARA (“Perseoran”) oleh Pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseoran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT LAWANA SUKSES NUSANTARA
Gedung Permata Kuningan Lantai 16
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Kel. Guntur, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - Indonesia
Jakarta, 27 Agustus 2021
Direksi
PT LAWANA SUKSES NUSANTARA

PENGUMUMAN RENCANA PENGAMBILALIHAN SAHAM

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), bersama ini diumumkan bahwa terdapat rencana pengambilalihan saham dalam PT LINTAS MARITIM INDONESIA (“Perseoran”) oleh Pihak lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (4) UUPT, bagi kreditor yang memiliki keberatan terkait dengan rencana pengambilalihan sebagaimana disebut di atas, dapat mengajukan keberatan kepada Perseoran dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT LINTAS MARITIM INDONESIA
GAMA TOWER Lantai 41
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
Kel. Karet Kuningan, Kec.
Setiabudi,
Jakarta Selatan,
DKI Jakarta - Indonesia
Jakarta, 27 Agustus 2021
Direksi
PT LINTAS MARITIM INDONESIA

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM				LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN INTERIM		LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM	
Per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020				Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020		Untuk Periode 6 (Enam) Bulan yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2021 dan 2020	
(Dalam Ribuan Rupiah)				(Dalam Ribuan Rupiah)		(Dalam Ribuan Rupiah)	
ASET	30 Jun 2021	31 Des 2020	LIABILITAS DAN EKUITAS	30 Jun 2021	31 Des 2020	30 Jun 2021	30 Jun 2020
ASET LANCAR			LIABILITAS JANGKA PENDEK			ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
Kas dan Setara Kas	227.352.618	214.285.895	Utang Bank Jangka Pendek	18.844.800	–	Penerimaan dari Pelanggan	683.835.920
Deposito Berjangka	3.818.246	3.715.257	Utang Usaha	–	–	Pembelian Pajak Penghasilan	–
Putang Usaha	–	–	Utang Pihak Ketiga	40.697.952	51.942.435	Pembayaran Pajak Penghasilan	22.464.304
Pihak Ketiga	133.213.053	132.292.996	Utang Pajak	7.211.947	12.366.456	Pembayaran Pajak Penghasilan	(22.178.971)
Aset Keuangan Lancar Lainnya	–	–	Utang Beban Akrual	45.509.908	54.306.944	Pembayaran kepada Karyawan	(96.773.886)
Pihak Ketiga	19.106.277	37.130.971	Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	–	–	Pembayaran Bunga	(24.446.675)
Persediaan	346.128.221	238.115.922	Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang:			Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(383.156.982)
Pajak Dibayar di Muka	57.731.814	70.491.883	Utang Sewa Pembiayaan	11.450.995	53.557.261	Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	157.279.406
Biaya Dibayar di Muka	4.373.826	6.408.199	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	370.437.908	167.522.197		
Utang Muka	5.863.575	2.690.685	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	370.437.908	167.522.197		
Total Aset Lancar	797.585.630	706.111.808	Total Liabilitas Jangka Pendek	905.532.162	625.664.501	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
ASET TIDAK LANCAR			LIABILITAS JANGKA PANJANG			Penjualan Aset Tetap	–
Aset Pajak Tangguhan	24.415.438	21.007.145	Liabilitas Pajak Tangguhan	4.691.302	5.032.690	Pembelian Aset Tetap	(3.865.654)
Goodwill	29.127.982	29.127.982	Utang Sewa Pembiayaan	367.888.193	378.103.185	Pencairan Deposito Berjangka	227.370
Aset Tetap - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan	1.188.313.688	1.302.669.302	Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	3.870.432	290.958.931	Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(3.638.284)
Aset Takberwujud - Setelah Dikurangi Amortisasi	132.919.428	141.853.216	Liabilitas Imbalan Kerja	45.738.173	42.254.383		
Pihak Berelasi	–	582.367	Total Liabilitas Jangka Panjang	422.188.100	716.348.189	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
Pihak Ketiga	10.078.045	10.738.081	TOTAL LIABILITAS	1.327.720.262	1.342.013.690	Pembayaran Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	(118.482.009)
Aset Lain-lain	22.879.367	22.934.801				Penerimaan Utang Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	43.488.000
Total Aset Tidak Lancar	1.407.733.948	1.528.912.894	EKUITAS			Pembayaran Pinjaman kepada Pihak Ketiga	(21.459.664)
			EKUITAS yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan	(45.243.295)
			Modal Saham - Nilai Nominal per Saham	281.394.199	281.394.199	Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(141.696.968)
			Modal Dasar - 8.000.000.000 Saham Modal Diperikan dan Disetor Penuh -	243.798.490	243.798.490		
			Modal Ditutupi dan Disetor Penuh -	305.921.511	313.224.993	KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	11.944.154
			Saldo Laba	–	–	PENGARUH PERUBAHAN KURS VALUTA KAS DAN SETARA KAS	1.142.569
			Selisih Transaksi dengan Pihak Nopengendalian	26.134.065	26.281.566	KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	214.265.895
			Penghasilan Komprehensif Lain	81.489.743	73.502.853		
			Sub Total	938.736.008	938.202.101	KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	227.352.618
			Keperincian Nopengendalian	(61.138.892)	(45.191.089)		
			TOTAL EKUITAS	877.597.116	893.011.012		
			TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	2.205.319.578	2.235.024.702		
TOTAL ASET	2.205.319.578	2.235.024.702					

Catatan:
- Informasi Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 Juni 2021 dan 2020 diperoleh dari Laporan Konsolidasian yang tidak diaudit.
- Informasi Laporan Keuangan 31 Desember 2020 diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf. Aryanto. Mawar & Rekan. member of the RSM Network yang dalam laporannya bertanggal 31 Maret 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi.